

SKRIPSI

**PELEPASAN TANAH ULAYAT KEPADA PEMERINTAH MANGGARAI
TIMUR UNTUK PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM DITINJAU
DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK
PENYELENGARAAN KEPENTINGAN UMUM**



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH

**MARSELINUS SESO
2018110282**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS FLORES
ENDE
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PELEPASAN TANAH ULAYAT KEPADA PEMERINTAH MANGGARAI TIMUR
UNTUK PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM DITINJAU DARIPERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK PENYELENGARAAN
KEPENTINGAN UMUM**

SKRIPSI

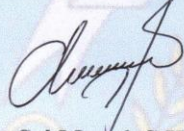
Di Susun Oleh :

**Marselinus Seso
2018110282**

Program Studi Ilmu Hukum

Disetujui

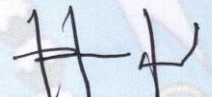
Dosen Pembimbing I



Christiana Sri Murni, S.H.,M.Hum

NIDN : 0828066101

Dosen Pembimbing II



Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum

NIDN : 0812117801

Mengetahui

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Flores**



Yohanes Pande, S.H.,M.H

NIDN : 0807127403

**Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Flores**



Christina Bagenda, S.H., M.H

NIDN : 0828066101

LEMBAR PENGESAHAN

PELEPASAN TANAH ULAYAT KEPADA PEMERINTAH MANGGARAI TIMUR
UNTUK PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM DITINJAU DARI
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN
TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK PENYELENGARAAN
KEPENTINGAN UMUM

SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Depan Penguji

Pada Hari : Jumat

Tanggal : 24 Februari 2022

Tim Penguji

1. Kosmas Minggu, S.H.,M.Hum (Ketua) 1.....
2. Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum (Sekretaris) 2.....
3. Christina Bagenda, S.H.,M.H (Anggota) 3.....
4. Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum (Anggota) 4.....
5. Christiana Sri Murni, S.H.,M.Hum (Anggota) 5.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Flores

Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Flores

Yohanes Pandé, S.H.,M.H
NIDN : 0807127403

Christina Bagenda, S.H., M.H
NIDN : 0828066101

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Marselinus Seso

NIM : 2018110282

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah / skripsi ini, merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah di ajukan oleh siapapun dalam memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi manapun.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan dipergunakan sebagai mana mestinya.

Ende, 15 Maret 2023



Marselinus Seso

Nim 2018110282

MOTO

“Sehari Sehelai Benang, Lama Kelamaan Jadi Selebar Kain.”

Penulis

Marselinus Seso

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dalam proses pengerjaan Skripsi ini tidak terlepas dukungan dan Do'a dari berbagai pihak, Peneliti secara khusus mengucapkan terima kasih sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Peneliti banyak menerima bimbingan, petunjuk dan dukungan serta dorongan yang membangun dari berbagai pihak baik yang bersifat moral maupun materil. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa dengan segala rahmat serta kasih karunianya yang berlimpah sehingga diberikan kekuatan dan kemudahan bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada kedua orang tua tersayang bapak Maksimus Jaleng dan ibu Petronela Ndu'a yang selama ini telah membantu dan mendukung peneliti dalam bentuk moral maupun materil yang tak terhingga demi kelancaran dan kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan juga penulis mengucapkan terima kasih kepada kaka Fransiskus xavarius Naii Seso, Yeremias jaleng Seso, Maria Helena Seso. Adik Franciska Selestia Guterres, Venansiu Pani, Nobertus Nestol Pote yang selalu memberikan dukungan dan perhatian kepada peneliti.
3. Kepada Ibu Christiana Sri Murni S.H.,M selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dorongan dan semangat kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Kepada Bapak Hendrikus Haipon S.H.,M.Hum selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dorongan dan semangat kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Segenap Dosen dan seluruh Staf Akademika Fakultas Hukum Universitas Flores, yang selalu membantu dan memberikan fasilitas ilmu serta pendidikan kepada peneliti sehingga dapat menunjang dalam penyelesaian skripsi ini
6. Kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Flores angkatan 2018 yang telah memberikan dukungan dan perhatian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepada peneliti dalam proses penyusunan skripsi ini, dan semoga Penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi peneliti dan juga pembaca.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan kekuatan serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul, “**Pelepasan Tanah ulayat Kepada Pemerintah Manggarai Timur Untuk Pembangunan Kepentingan Umum Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Penyelenggaraan Kepentingan Umum**”, dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Flores.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan dalam penyusunan skripsi ini penulis mengalami kesulitan, hambatan, dan rintangan. Akan tetapi, berkat bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yaitu Bapak dan Ibu Dosen serta praktisi viiiang lainnya, skripsi ini dapat diselesaikan meskipun masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki.

Pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Rektor Universitas Flores Dr. Simon Sira Padji, M.A. beserta jajarannya yang telah memberikan perhatian besar demi perkembangan Pendidikan di Universitas Flores.
2. Bapak, Yohanes Pande S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores, yang senantiasa memberikan dukungan dan usul saran kepada penulis selama proses bimbingan ini berjalan.

3. Bapak Bernadus. B. Kelen, S.H.M.,Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores.
4. Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sejak awal pemilihan judul hingga selesai siding skripsi.
5. IbuChristiana Sri Murni, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Hendrikus Haipon S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan perhatian dan dukungan kepda penulis selama proses bimbingan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu akademik dalam bidang ixang selama mengikuti proses perkuliahan.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu baik moril maupun materil kepada penulis. Semoga amal kebaikan semua pihan yang telah membantu penulis dibalas dengan selayak-layaknya oleh Tuhan Yang Maha Baik. Disertai doa dan harapan, penulis mempersembahkan karya Ilmiah dalam bentuk skripsi ini.

Ende, Februari 2023

Penulis

Marselinus seso

ABSTRAK

Pelepasan Tanah ulayat Kepada Pemerintah Manggarai Timur Untuk Pembangunan Kepentingan Umum Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Penyelenggaraan Kepentingan Umum Oleh Marselinus Seso, Nim: 0218110282 Skripsi: Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Flores Pembimbing1 Christiana SryMurni, S.H., M.Humdan Pembimbing II Hendrikus Haipon, S.H.M.Hum.

Pelepasan Tanah ulayat dengan memberikan ganti rugi sesuai amanat peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pelepasan Tanah ulayat Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum khususnya diatur dalam pasal 78. Permasalahan yang diteliti adalah : Bagaimana Pelaksanaan Pelepasan Tanah ulayat Kepada Pemerintah Manggarai Timur Untuk Kepentingan Umum Waelengga, Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Penyelenggaraan Kepentingan Umum. Faktor-faktor Penghambat dalam Proses Pelaksanaan Pelepasan Hak Tanah ulayat suku Motu Serta Pemberian Ganti Kerugian dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Untuk Pembangunan Kepentingan Umum Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021

Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Penyelenggaraan Kepentingan Umum. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian yang ditemukan adalah pelepasan tanah ulayat kepada Pemerintah Manggarai Timur, Pemerintah Manggarai Timur belum merealisasikan ganti kerugian atas tanah yang diserahkan dikarenakan anggaran dan biaya pembangunan bandara dengan ganti rugi atas tanah. Kesimpulan: Bahwa kepala suku Motu berharap kepada pemerintah Kabupaten Manggarai Timur segera merealisasikan ganti kerugian atas Tanah yang diberikan yang berupa uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pembangunan rumah adat atas kesepakatan bersama yang melalui musyawara antara pihak suku Motu dan pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dan dasar perhitungan ganti rugi yang dipergunakan dalam musyawarah adalah hasil penilaian lembaga atau tim penilaian harga tanah. Penentuan besarnya ganti rugi adalah kesepakatan pemilik dari suku Motu dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur yang membutuhkan tanah Hasil kesepakatan, oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten/Kota, setelah pengukuran yang telah ditetapkan dan diberitahukan. Faktor penghambat dalam ganti kerugian atas tanah ulayat yang diberikan suku Motu kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur berupa dana dan anggaran pembangunan bandara dan ganti kerugian yang belum ada sampai sekarang dikarenakan ganti kerugian dan pembangunan bandara membutuhkan tanah yang besar sehingga ganti kerugian belum terealisasi dimana pada Tahun 2021 kemarin pemerintah masih fokus dengan dana penanganan covid-19 yang sangat meningkat, sehingga Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur kewalahan dengan dana pembangunan sekaligus ganti rugi untuk masyarakat adat suku Motu.

Kata kunci: Pelepasan, Tanah ulayat.

ABSTRACT

Release of Ulayat Land to the East Manggarai Government for Development of Public Interests In View of Government Regulation Number 19 of 2021 Concerning Land Acquisition for Development of Public Interests By MarselinusSeso,Nim: 0218110282 Thesis:Legal Studies Program, University of Flores Supervisor 1 Christiana sryMurni. S.H., M.Hum and Supervisor II HendrikusHaipon, S.H M.Hum.

Land release is a release by providing compensation according to the mandate of government regulation Number 19 of 2021, specifically referring to article 78 of government regulation Number 19 of 2021. The issues studied are: How is the Implementation of Release of Ulayat Land to the East Manggarai Government for the Public Interest of Waelengga, In Review From Government Regulation Number 19 of 2021 concerning Land Acquisition for Development for the Implementation of Public Interests. What are the Obstacles in the Process of Executing the Relinquishment of the Motu Tribe's Ulayat Land Rights and the Provision of Compensation from the East Manggarai Regency Government for the Development of Public Interests In terms of Government Regulation Number 19 of 2021 concerning Land Acquisition for Development for the Implementation of Public Interests. The type of research used in the research These are: by using an empirical research approach using a sociological juridical approach. The results of the research: what the authors found was the release of communal land to the East Manggarai Government, the East Manggarai Government had not realized compensation for the land handed over due to the budget and costs of building the airport and compensation for land. Conclusion: . Whereas the head of the Motu tribe hopes that the East Manggarai Regency government will immediately realize compensation for the land provided in the form of money worth Rp100.000.000,00 (one hundred million rupiah) and the construction of traditional houses based on a joint agreement through deliberation between the Motu tribe and the district government East Manggarai and the basis for calculating compensation used in the deliberation is the result of the assessment of the institution or team evaluating the land price. Determination of the amount of compensation is an agreement between the owner of the Motu tribe and the East Manggarai Regency Government who need land as a result of the agreement, by the Regency/City Land Procurement Committee (P2T), after the measurement has been determined and the pillars are planted. Given by the Motu tribe to the East Manggarai Regency Government in the form of funds and the budget for development and compensation that has not existed until now is due to compensation and airport construction requiring large funds. So that compensation has not been realized where in 2021 yesterday the government was still focused on funds for handling covid-19 which greatly increased, so that the East Manggarai Regency Government was overwhelmed with development funds as well as compensation for the indigenous people of the Motu tribe.

Keywords: Release, Customary land.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Ruang lingkup Masalah.....	10
1.4. Tujuan Penelitian.....	10
1.5. Manfaat Penelitian.....	11
1.6. Metode Penelitian.....	12
1.7. Lokasi Penelitian	15
1.8. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1. Pengertian Tanah ulayat	17
2.2. Pengertian Hak Ulayat.....	19

2.3 Syarat-syarat Pelepasan Tanah.....	21
2.4 Prosedur Pelepasan Hak Atas Tanah.....	24
2.5 Pengertian Pelepasan Atas Tanah	25
2.6 Pengertian Pengadaan Tanah	25
2.7 Pengertian Kepentingan Umum	28
2.8 Asas-asas Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	31

BAB III PELEPASAN TANAH ULAYAT KEPADA PEMERINTAH MANGGARAI TIMUR UNTUK PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK PENYELENGARAAN KEPENTINGAN UMUM ..34

3.1 Tahapan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum	34
3.1.1 Tahapan Pelepasan Tanah Ulaya Suku Motu Bersamama Tiga Lapisan Suku Motu	34
3.1.2 Tahapan Pelepasan Tanah ulayat Ketua Adat Suku Motu Dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur	38
3.2 Pelaksanaan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Pemberian Ganti Rugi	43
3.3 Dinas Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur	44
3.4 Pelepasan Tanah ulayat Kepada Pemerintah Manggarai Timur Untuk Pembangunan Kepentingan Umum Waelengga.....	46

BAB IV FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PROSES PELAKSANAAN PELEPASAN HAK TANAH ULAYAT SUKU MOTU SERTA PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR UNTUK PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM..... 52

4.1.Faktor- Faktor Internal	52
4.2 Faktor- Faktor Eksternal.....	53
BAB V PENUTUP	55
5.1 Kesimpulan.....	55
5.2 Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	